

“Strategi Pemerintah Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Melalui Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Bersemai Tahun 2005 - 2010.”

RANNUH WIJAYA PUTRA
Email : Putrarannuhwijaya@yahoo.co.id
Pembimbing :Dr.Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Strategy Of Increasing Local Revenues (PAD) is interesting to study because an important factor in the implementation of regional autonomy as one of the government's success in organizing the financial management area. This study describe's the government's strategy to increase revenue through local companies PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

This study used a qualitative method and conducted in Dumai city. This study uses informants as sources of information objects that aims to achieve mastery in getting information. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis of the data in a descriptive study conducted by describing the data in a systematic and objective so as to produce factual information, current, and accurate.

Based on the results of the study found the following matters : first, PAD Improvement Strategy in PD. Pelabuhan Dumai Bersemai have a strategy that includes: Optimization of Corporate Strategy, Corporate Business Recovery Strategy, Potential Restructuring Company. The implementation of recovery strategies see the number of requests and restructuring loans made PD. Pelabuhan Dumai Bersemai and Local Government, to prepared anticipation government strategy in the management of the port as a benchmark for successful implementation of the strategy of empowering PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Second, as for one of the factors that influence the increase in revenue in PD. Pelabuhan Dumai Bersemai is the capital of the Government and also the expansion of the port area by a third party to improve service assets, and the increase in the number of ship visit every year.

Keyword: Strategy, Increasing Local Revenues(PAD), Dumai.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Penerima Pusat dan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah “Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.”

Pada tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian perusahaan ini dimaksud agar pemerintah daerah dapat berperan serta dalam usaha pelayanan jasa kepelabuhanan dan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus dibentuk untuk melayani jasa kepelabuhanan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 07 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai.

Kontribusi PAD PD. Pelabuhan Dumai Bersemai kepada Kota Dumai di tahun 2007 – 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam bentuk bagi hasil antara pemilik modal dan perusahaan (Deviden) sementara pada retribusi jasa labuh pada tahun 2007 – 2009 mengalami peningkatan dan kembali turun pada tahun 2009 – 2010, kemudian kembali melonjak tinggi pada tahun 2011 dan turun kembali di tahun 2012, namun pada tahun 2011 dapat dilihat bagi hasil antara PD.

Pelabuhan Dumai Bersemai dan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dengan jumlah retribusi yang tinggi Rp.6,928,307,751 Pemko Dumai mendapatkan deviden dengan jumlah Rp.846,715,269 sementara perbandingan pada tahun 2012 dengan jumlah retribusi rendah Pemko Dumai mendapatkan deviden / laba yang tinggi dengan jumlah Rp.1,309,455,175 dengan jumlah retribusi 4,848,259,300 hal ini yang menjadi fenomena dimana strategi dan faktor yang menjadi pengaruh kontribusi jasa kepelabuhanan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

Strategi yang diusahakan pemerintah adalah melihat peluang bahwa Kota Dumai sangat strategis untuk pengembangan kegiatan kepelabuhanan sehingga dipandang perlu untuk menggarap sektor kepelabuhanan tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari data dan bentuk jasa kepelabuhanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai penulis melihat ada beberapa strategi yang mendukung peningkatan pendapatan, hal ini yang menjadi rujukan penulis tertarik untuk meneliti tentang kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai dibalik suksesnya Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai penulis mencoba menganalisis tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jasa kepelabuhanan.

Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dalam konsideran yang tercantum penulis melihat salah satu cara / strategi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kepelabuhanan adalah menetapkan kebijakan dengan menimbang bahwa untuk mengelola sektor kepelabuhanan tersebut, pemerintah kota telah memulainya mengelola melalui Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai, dimana dalam perkembangannya menunjukkan kinerja yang baik sehingga dipandang perlu untuk menindak lanjuti pendiriannya melalui peraturan daerah. Didalam Perda tersebut dijelaskan tentang bagaimana modal yang diperoleh oleh Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai, yaitu :

- Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang ada pada saat dibentuk.
- Modal Perusahaan Daerah dapat seluruhnya atau sebagian berasal penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Setiap penyertaan, modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selain penyertaan modal didalam Perda No. 7 Tahun 2005 juga mengatur tentang kerjasama pihak ketiga sebagai salah satu strategi bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas dalam mengembangkan usaha, kerjasama yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan;
- Membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan penulis tertarik melakukan penelitian pada fokus Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pelabuhan dan efisiensi usaha disektor ini, dengan mengidentifikasi beberapa sudut pandang pada kontribusi pelabuhan Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai yang cukup besar serta total penerimaan dana alokasi dari pemerintah ke perusahaan dan kontribusi perusahaan ke daerah hal ini berdasarkan data pada tahun 2005 – 2010 tentang kontribusi Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penulis melihat bahwa dari regulasi UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2004 mempunyai fokus dalam memaksimalkan dan mengoptimalisasi potensi yang ada di daerah untuk mendapatkan

Pendapatan Asli daerah (PAD) dan meningkatkan kemampuan keuangan di daerah hal ini sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil tindakan yang menghasilkan kebijakan umum untuk menyusun strategi peningkatan PAD agar terciptanya kawasan daerah yang mandiri.

METODE

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan:

1.1 Data Primer

suatu objek atau dokumen original – materil mentah dari pelaku yang disebut “Firsthand information”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dimanakan data primer. Data atau sumber data primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran – lembaran penulisan kreatif, dan objek – objek seni, lembaga atau instansi pemerintah dan informan di lapangan sebagai data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-→dokumen ataupun laporan-laporan resmi, juga dari sumber - sumber lain yang relevan.

1.2 Data Sekunder

data yang dikumpulkan dari tangan kedua dari sumber - sumber yang lain sebelum penelitian dilakukan. Data yang di kumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Bahan - bahan sumber data skunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel – artikel yang ditemukan di jurnal ilmiah, buletin statistik laporan - laporan, atau arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang tersedia dari dalam atau dari luar organisasi, analisis – analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, data base yang ada dari penelitian terdahulu, catatan publik mengenai peristiwa – peristiwa resmi dan catatan – catatan perpustakaan juga merupakan sumber data skunder.

Data penelitian diperoleh dari informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Informan adalah orang yang dianggap tepat dan bisa dipercaya untuk memberikan sumber data guna mengungkapkan suatu fenomena. Penggalan informasi diawali dari penuturan informan awal yang kemudian menunjuk informan utama (key informan). Informasi dari informan utama selanjutnya diaktualkan dan diperkaya secara bergulir - menggelinding (snowballing)

kepada informan berikutnya sampai dengan terjadi kejenuhan informasi. Hal ini dilakukan agar variasi, kedalaman, dan kerincian data/informasi dapat diperoleh secara optimal. Informan utama atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Daerah Kota Dumai yang pada saat penelitian dilakukan bertanggung jawab dan pejabat lain di Dispenda yang menurut informan awal atau informan kunci dinilai mengetahui, menguasai, dan memahami bahkan menghayati hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang bersumber dari dokumen yaitu catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Dumai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, serta Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari suatu tempat atau area dimana peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan (observasi) terhadap gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber :

- Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Pemerintah Daerah Kota Dumai.

- PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

2. Informan Penelitian

2.1 Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi banyak.

2.2 Seperti telah disebutkan bahwa pada dasarnya penelitian ini menfokuskan pada Strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui PD. Pelabuhan Dumai Bersemai, administrasi pajak daerah dan kemampuan keuangan daerah dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kebijakan umum pendapatan daerah dan strategi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah :

- Pejabat pemerintahan daerah khususnya di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai

informan terpilih yakni Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi di dinas tersebut dan akan berlanjut kepada pejabat lain seperti kepala seksi yang membawahi beberapa kegiatan yang terkait dengan fokus penelitian dan mampu mengungkapkan informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

- Pihak masyarakat sebagai stakeholder yang mengontrol segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun informannya dalam hal ini adalah Non Government Organization (NGO) yang sering melakukan advokasi kegiatan antara pemerintah dengan masyarakat, kalangan akademis, pengusaha dan masyarakat biasa yang mendapatkan manfaat dari proses pembangunan sekaligus mengontrol segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

No	Nama Informan
1	Sudiby SA
2	Syafuruddin Atan Wahid, SH
3	Akmal, SE

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan proses, yaitu *getting in*, *getting along*, dan *logging the data*.

3.1 *getting in*

merupakan proses memasuki lokasi penelitian. Jalur formal dengan menggunakan prosedur

penelitian yang berlaku di Kota Dumai, yaitu diawali dengan pembuatan ijin penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Dumai yang digunakan untuk memperoleh data di instansi Pemerintah Kota Dumai. Setelah ijin penelitian diperoleh, peneliti menghubungi contact-persons di masing - masing instansi Pemerintah yang dituju untuk melakukan perkenalan dan komunikasi awal guna menjalin kedekatan. Sementara itu, untuk lokasi penelitian non instansi Pemerintah proses memasukinya lebih sederhana, yaitu melalui proses perkenalan yang natural (alamiah) melalui komunikasi dalam bentuk obrolan ringan dengan tujuan juga untuk menjalin kedekatan.

3.2 *getting along*

yakni menjalin interaksi personal yang lebih mendalam dan harmonis dengan sumber informasi untuk memperoleh data - data yang relevan. Kegiatan personal interaktif ini juga untuk lebih menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas terhadap peneliti. Komunikasi interpersonal yang persuasif juga dilakukan terutama untuk memperoleh informasi yang bersifat sensitif, misalnya penilaian (judgement) informan terhadap suatu kebijakan atau makna - makna yang tersembunyi.

3.3 logging the data

merupakan tahap pengumpulan data yang dibutuhkan yang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi, melalui wawancara mendalam peneliti dapat memperoleh dan mengungkapkan informasi yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan informan yang eksplisit maupun implisit, termasuk opininya terkait dengan masalah penelitian. Untuk memperoleh informasi dan opini yang tajam dan mendalam peneliti menciptakan suasana wawancara yang informal, spontan dan alamiah, informan diposisikan sebagai pemecah masalah. Dalam hal ini wawancara dikondisikan berjalan tidak terstruktur, namun tetap dalam kerangka fokus penelitian, terutama mengenai hal-hal yang bersifat formal, misalnya kebijakan serta sistem dan prosedur pembangunan daerah dan pajak daerah.

3.4 Teknik Dokumentasi

bermanfaat untuk memperoleh data dalam bentuk dokumen atau catatan yang terkait dengan konsep kebijakan, implementasi, dan dampak yang muncul di lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung

dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan digunakan adalah Analisis Deskriptif Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori - kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Kota Dumai

1.1. Strategi Optimalisasi PD. Pelabuhan Dumai Bersemai

1.1.1. Restrukturisasi Pengelolaan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai

Deregulasi dibidang peraturan antara lain dengan memberi kewenangan yang lebih luas kepada direksi perusahaan daerah dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dapat lebih leluasa dalam meraih dan memanfaatkan peluang bisnis ataupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 07 Tahun 2005.

Setelah beroprasinya PD. Pelabuhan Dumai Bersemai penulis melihat adanya prestasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah mampu menunjukkan kinerja baik diukur dari aspek ekonomis maupun sosial masyarakat, dengan ini untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas usaha guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing perlu untuk meningkatkan fungsi dan peranya untuk meraih laba dengan melihat hal ini pemerintah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2012 Tentang "Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Bersemai Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dumai Berseri." dengan maksud perubahan bentuk badan hukum dan nama PD. Pelabuhan Dumai Bersemai menjadi PT. Pelabuhan Dumai Berseri adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali, dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

a. Pembinaan dibidang manajemen umum, administrasi teknik dan keuangan dengan :

- Meningkatkan kemampuan manajerial bagi direksi perusahaan daerah melalui kursus – kursus dan studi perbandingan.

PD. Pelabuhan Dumai Bersemai juga melakukan pendidikan dan pelatihan untuk menjalani perubahan, peran bidang SDM sangat kuat karena harus mempersiapkan dan mengoptimalisasi kemampuan semua sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Untuk itu, perusahaan akan terus merancang strategi pendidikan dan pelatihan yang tepat, yang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi PD. Pelabuhan Dumai Bersemai di masa yang akan datang.

Pada tahun 2009 perusahaan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai mengutus beberapa orang untuk ikut dalam pelatihan Management Training (Modul 2) yang di ikuti oleh salah satu Badan Pengawas PD. Pelabuhan Dumai Bersemai khusus untuk program Enhacing Planning and Management Competence for port Development in Decentralized Administration Units kerjasama antara PKSPL - IPB Bogor, InWent - Germany, dan Departemen Perhubungan RI, yang dilaksanakan selama 2 bulan di Bremen, Jerman. Setelah pelatihan selama 2 bulan akan dilanjutkan dengan tranfer phase selama 1 bulan di Dumai, dan dilanjutkan dengan masa penyelesaian pelatihan (phase3) selama 1 bulan di Bogor.

Kemudian PD. Pelabuhan Dumai Bersemai juga melakukan beberapa program pelatihan (training) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan program pengembangan

bertujuan untuk mempersiapkan SDM agar dapat memangku jabatan tertentu dimasa yang akan datang. Pengembangan bersifat luas karena menyangkut banyak aspek, seperti peningkatan dalam segi keilmuan/pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan antara lain untuk memperkecil gap antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan, selain juga untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja.

1.1.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kerja sama perusahaan daerah dengan pihak ketiga dalam upaya memanfaatkan aset perusahaan daerah agar lebih berdaya guna. Dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya PD. Pelabuhan Dumai Bersemai bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki aset kepelabuhanan kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalisasi potensi yang ada di perusahaan kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk pandu dan tunda kapal.

1.1.3. Meningkatkan Kemampuan Permodalan

Meningkatkan kemampuan permodalan melalui bantuan pinjaman dari dalam dan luar negri. Melepas aset yang benar- benar tidak efesien dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan permodalan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai telah melakukan berbagai

kerjasama terhadap beberapa pengusaha dan bank serta investor yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

1.1.4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam melaksanakan strategi peningkatan kualitas dibutuhkan partisipasi aparatur dalam proses pengambilan keputusan. Sebab partisipasi yang diberikan baik berupa ide, gagasan, persepsi atau pendapat akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Keterlibatan ini juga akan memberikan alternatif - alternatif pilihan keputusan yang akan dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dengan adanya pilihan alternatif tersebut, pimpinan bisa mengambil alternatif yang terbaik dan menjadi prioritas organisasi dalam mencapai tujuannya.

1.1.5. Pelayanan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, diharapkan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Artinya pungutan yang dilakukan memang merupakan kewenangan daerah yang bersangkutan dan pelaksanaanya telah dituangkan dalam peraturan perundang – undaangan yang berlaku (peraturan daerah) serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, juga telah ditempatkan dalam lembaran daerah.

2. Strategi *Recovery* Bisnis

2.1. Peningkatan Permintaan

Program peningkatan permintaan mencakup peningkatan daya beli konsumen. Misalkan dengan upaya pemberian intensif dan kredit dengan suku bunga rendah, percepatan program politik dan ekonomi daerah yang mampu memberdayakan semua sektor ekonomi, perluasan pasar yang didukung kepastian hukum, dengan memberikan kesempatan asing untuk berinvestasi, dan strategi lainnya.

2.2. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi pinjaman dalam kaitan dengan pinjaman pengembang yang tergolong NPL (non-performing loan). Dalam rangka proyek yang terkait dengan NPL, dilakukan audit proyek. Audit proyek ini meliputi :

- Identifikasi proyek bermasalah
- Evaluasi proyek yang bermasalah
- Re-feasibility study atas proyek yang masih layak untuk dilanjutkan pemberian pinjaman
- Manajemen aset atas proyek yang sudah tidak layak untuk dilanjutkan proses peminjamannya.

2.3. Restrukturisasi Potensi PD. Pelabuhan Dumai Bersemai

Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit

sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah untuk mampu menghimpun sumber – sumber dana potensial guna mendukung biaya operasi pemerintah daerah. Tentunya perlu dilakukan langkah strategi untuk mengevaluasi dan merestrukturisasi sumber – sumber penerimaan daerah, baik yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) maupun yang merupakan imbalan penerimaan dengan pihak lain, baik pemerintah pusat, pengusaha maupun masyarakat lain.

3. Faktor – Faktor Pendukung

3.1. Pendanaan Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Kapital

Pemerintah daerah diberi sejumlah modal. Modal kemudian di investasikan sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin dan mungkin membayar kembali modal tersebut menghasilkan deviden, atau pelunasan investasinya. Sumber modal mungkin disediakan melalui bantuan (*grant*), sehingga tidak diperlukan adanya pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu atau melalui penyerahan (*equity*),

sehingga mungkin dapat diharapkan (barang kali juga tidak) adanya deviden. Sumber modal bisa berasal dari pemerintah, sumber internasional atau sektor usaha. Bidang usaha yang dibiayai dari modal ini antara lain badan – badan pembangunan daerah, instansi – instansi pengembangan daerah, instansi – instansi pengembangan daerah perkotaan, dan pelayanan kebutuhan masyarakat.

3.2. Pendekatan

Pengeluaran Pendanaan Pemerintah Daerah

Pendekatan pengeluaran berarti bahwa pembagian dana dari pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya, berupa pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sistem ini bertujuan untuk membiayai tingkat pengeluaran tertentu atau pembiayaan pelayanan atau program pembangunan tertentu. Pendekatan ini mempunyai keterbatasan yang menyangkut masalah penilaian atas kebutuhan pengeluaran yang objektif, karena biasanya di gunakan biaya – biaya historis untuk perhitungan.

3.3. Tindakan Fiskal Pemerintah Kota Dumai

Tindakan ini merupakan anggaran surplus melalui peningkatan pajak pengurangan pengeluaran pemerintah, perluasan sektor ekspor. Disamping itu pemerintah dapat menaikkan tabungan dengan menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah dengan lebih efisien sehingga badan usaha ini memperoleh pendapatan yang lebih besar.

3.4. Intensifikasi Modal PD. Pelabuhan Dumai Bersemai

Pemerintah daerah diberikan sumber – sumber pendapatan tertentu (terutama pajak) untuk dimanfaatkan bagi pengeluaran bagi pengeluaran – pengeluarannya sesuai dengan urusan – urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemberian pendapatan mungkin dikaitkan dengan adanya pemberian beberapa jenis bantuan pusat untuk menyeimbangkan potensi pendapatan atau untuk mengurangi perbedaan – perbedaan yang di akibatkan oleh adanya perbedaan geografis dalam potensi pajak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan PAD pada PD. Pelabuhan Dumai Bersemai melakukan strategi optimalisasi, strategi *recovery* bisnis dan restrukturisasi potensi PD. Pelabuhan Dumai Bersemai, dengan adanya deregulasi peraturan, pembinaan perusahaan, dan pemberian modal kepada perusahaan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Strategi yang dilakukan pemerintah masih bersifat administratif hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat namun belum melakukan inisiatif dalam meningkatkan investasi pada perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih baik lagi. Meskipun demikian strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Dumai pada saat itu mampu mempertahankan peningkatan *Deviden* PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

Faktor dominan yang menjadi pendukung peningkatan laba (*deviden*) adalah setelah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Dumai yang memberi surplus lebih dari target yang ditetapkan, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki aset dan peningkatan pendapatan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai juga dipengaruhi oleh ekspansi dermaga oleh pihak ketiga sehingga terjadi

peningkatan jumlah kunjungan kapal pada pelabuhan Dumai, dan nilai tukar mata uang antara Rupiah (IDR) dan US.

2. Saran

Seharusnya Pemerintah bisa lebih optimal dalam meningkatkan PAD sektor pelabuhan melalui PD. Pelabuhan Dumai Bersemai apabila memiliki komitmen untuk pengadaan kapal dan pembangunan dermaga untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak ketiga. Secara keseluruhan untuk kebijakan dan implementasi kebijakan dalam oprasional telah memenuhi prosedur admisnistratif, namun belum memiliki inisiatif untuk meningkatkan pendapatan dengan pengadaan aset hal ini lah yang menjadi kendala terhambat pertumbuhan laba dan retribusi. Untuk itu, ada tiga hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, yaitu:

- Melakukan restrukturisasi penerimaan daerah, melalui upaya identifikasi, optimalisasi, dan implementasi program sumber – sumber penerimaan potensial pelabuhan.
- Melakukan pemberdayaan perusahaan daerah melalui program restrukturisasi,

profitisasi, dan privatisasi bisnis perusahaan daerah PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

- Melakukan optimalisasi dan pengadaan aset – aset produktif yang saat ini dirasakan masih belum optimal kalau tidak bisa dikatakan disia – siakan.
- Pemerintah perlu untuk meningkatkan peran PD. Pelabuhan Dumai Besemai dalam memberikan jasa kepelabuhanan baik dalam hubungan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan pihak ke tiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

Jhingan, M.L., 2013. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Noor, H.F., 2013. Ekonomi Manajerial, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Hanim, S dan Adnan, I.M., 2005. Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan.

Silalahi, U., 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama

Doli, S.D., 2004. Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks

Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama
Yani, A., 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta, Rajawali Pers

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Penerima Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pada Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Layanan Kepelabuhanan

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai Menjadi

Perseroan Terbatas
Pelabuhan Dumai Berseri
Keputusan Walikota Dumai
Nomor
381/PEREKO/2009
Tentang Peningkatan
Badan Pengawas
Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai

Keputusan Walikota Dumai
Nomor
63/PEREKO/2012
Tentang Penunjukan
Petugas Sekretariat
Badan Pengawas Badan
Usaha Milik Daerah
Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai

Internet :

<http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/33040/2/ANALISIS-POTENSI-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DAN-STRATEGI-PENINGKATAN-KEMAMPUAN-KEUANGAN-DAERAH.pdf>. (diakses pada 28 Juni 2014, pukul : 15.42)

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fportalgaruda.org%2Fdownload_article.php%3Farticle%3D116961%26val%3D5330&ei=rBFU_3kAsiXrgeWwYDQAQ&usg=AFQjCNE11qyQKgbc6cyeZzH4pa_29Q

oZxg&bvm=bv.6539761
3,d.bmk (diakses pada 28
Juni 2014, pukul : 15.42)

Sumber Lainnya :

Jurnal :

David Kaluge dan Asfi
Manzilati,
2008, Analisis Potensi
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Strategi
Peningkatan Kemampuan
Keuangan Daerah, (Studi
Kabupaten Sumbawa)

Jufrizal dan Sujianto, 2013,
“ Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.”
FISIP UR, Vol 1 No. 2

Lis Elfianti, 2011, Potensi
dan Strategi Pengelolaan
Pajak dan Retribusi
Daerah Studi Kasus di
Kabupaten Sijunjung

Dinas Pendapatan Daerah :
Disnas Pendapatan Daerah,
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
(RPJMD) Daerah Kota
Dumai Tahun 2005-2010

Dinas Pendapatan Daerah,
Jadwal Rekonsiliasi
Tahun 2014

Dinas Pendapatan Daerah,
Rekapitulasi Penerimaan
PD. Pelabuhan Dumai
Bersemai Tahun 2004 -
2013

Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai :

Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai, Rencana
Anggaran Perusahaan
2007 – 2009

Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai, Profile
Company

Perusahaan Daerah
Pelabuhan Dumai
Bersemai, Kronologis
Masalah Pemanduan dan
Penundaan Oleh
Pemerintah Kota Dumai
Melalui PD. Pelabuhan
Dumai Bersemai